

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hal pelaksanaan pembangunan, keuangan merupakan salah satu faktor yang memegang peranan cukup penting dalam melaksanakan pembangunan di tingkat pusat maupun daerah. Untuk itu masalah keuangan ini membutuhkan pengelolaan yang baik. Tanpa pengelolaan yang baik kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan dapat terhambat. Dana-dana yang tersedia harus dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dicapai seperti yang diharapkan.

Masalah keuangan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan ini telah mempunyai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Aturan dan perundang-undangan ini antara lain mencakup sistem perencanaan, pemanfaatan dan juga tanggung-jawab. Jika aturan dan perundang-undangan ini diabaikan maka dapat dipastikan sasaran pembangunan yang telah ditentukan tidak akan tercapai.

Suatu unsur penting yang dipakai dalam menjaga kelancaran mengelola keuangan ini adalah administrasi keuangan. Administrasi keuangan ini dimiliki oleh semua unsur atau badan yang terkait dalam melaksanakan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Baik instansi negeri maupun swasta, pada instansi negeri, administrasi keuangan ini biasanya disebut dengan administrasi keuangan negara. Administrasi

keuangan ini harus dikelola dengan baik karena dana yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Mengelola keuangan ini mencakup kegiatan perencanaan, pembiayaan, pengawasan serta masalah-masalah keuangan lainnya yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku inilah yang dikatakan dengan kegiatan administrasi keuangan negara.

Dalam administrasi keuangan terdapat beberapa masalah penting yakni : Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan, akuntansi, laporan dan pengawasan di satu pihak dan penggunaan dana di pihak lain.

Dalam sistem perencanaan, pelaksanaan akuntansi, laporan dan pengawasan memerlukan organisasi sebagai wadah. Organisasi disini dimaksudkan bukan hanya organisasi yang bersifat sosial atau yang mempunyai ruang lingkup kecil seperti yang ada di kelurahan, misalnya organisasi pemuda, organisasi ibu-ibu dan organisasi lainnya, tetapi juga meliputi organisasi yang mempunyai ruang lingkup yang besar seperti perusahaan dagang sampai kepada organisasi yang disebut dengan negara. Organisasi merupakan wadah atau tempat orang bekerjasama atau tempat melaksanakan administrasi.

Dinas Perkebunan Kabupaten Deli Serdang adalah satu instansi pemerintah yang mempunyai peranan besar dalam pemerintahan di Kabupaten Deli Serdang. Dinas Perkebunan Kabupaten Deli Serdang adalah salah satu dinas yang berada di bawahnya sedangkan pemegang kas Dinas Perkebunan Kabupaten Deli Serdang adalah salah satu Bidang dalam pelaksanaan tugas dinas tersebut.

Keberadaan pemegang kas ini memegang peranan yang sangat penting